

# KONFLIK ORGANISASI PARTAI GOLKAR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KOMUNIKASI POLITIK DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN PARTAI

(Studi Kasus DPD Partai Golkar Kota Pontianak)

Oleh:

**MUBARAT DEONESIUS**

NIM. E02112067

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*e.mail* : [mubarat.deonesius@yahoo.com](mailto:mubarat.deonesius@yahoo.com)

## Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari konflik organisasi Partai Golkar terhadap komunikasi politik yang terjadi di DPD Partai Golkar Kota Pontianak tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini deskriptif. Penelitian ini menjelaskan beberapa hal yang meliputi Komunikator Politik, Pesan Politik, Saluran atau Media Politik, Target dan Sasaran serta Efek Komunikasi Politik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konflik internal Partai Golkar berimplikasi pada komunikasi politik DPD Partai Golkar kota Pontianak. *Pertama*, pada aspek komunikator politik telah terjadi dua komunikator yaitu pihak Aburizal Bakrie dan Pihak Agung Laksono. *Kedua*, pada aspek pesan politik terjadi dua informasi yang berbeda namun dianggap sah oleh kedua pihak. *Ketiga*, pada aspek saluran atau media Politik yang digunakan dalam menerima pesan yang dianggap sah baik itu surat edaran Partai maupun keputusan Menteri Hukum dan HAM. *Keempat*, pada aspek target dan sasaran adalah menentukan kepengurusan yang dianggap sah, dengan ini ada yang berpihak pada Aburizal Bakrie dan pada Agung Laksono. *Kelima*, pada aspek efek komunikasi politik telah terjadi konflik Golkar dipusat yang berdampak pada kepengurusan Golkar di daerah, dan dampak ini tidak hanya dirasakan oleh Golkar DPD Kota Pontianak, melainkan hampir seluruh Golkar di wilayah Indonesia mengalami hal yang sama.

Kata-kata Kunci : Partai Golkar, Konflik Organisasi, Komunikasi Politik.

## Abstract

This study aims to find out the impact of the organizational conflict of Golkar Party on political communication that occurred at Golkar Party Regional Executive Board (DPD) in Pontianak City in 2014. This research was a qualitative study with descriptive method. This research describes some of the things that include political communicators, political message, political channels or media, target, and political communication effects. The findings of this research showed that the internal conflict of Golkar Party had implications for the political communication of Golkar Party Regional Executive Board in Pontianak city. First, in the aspect of political communicator, there were two communicators i.e. Aburizal Bakrie and Agung Laksono. Second, in the aspect of political message, there were also two different sources of information but considered legitimate by both parties. Third, in the aspect of political channels or media used in receiving messages that were considered legitimate both the party's circular and the Decree of the Minister of Legal Affairs and Human Rights. Fourth, in the aspect of the target which is to determine the legitimate party executives, where some supported Aburizal Bakrie and some supported Agung Laksono. Fifth, in the aspect of political communication effects, there was conflict of Golkar Party at the central level which affected the management of Golkar in the regional level, and it not only affected the Golkar Regional Executive Board in Pontianak City but also almost all of Golkar regional boards throughout Indonesia.

*Keywords: Golkar Party, Conflict Organizational, Political Communication.*

## A. PENDAHULUAN

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya. Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan

untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Partai Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah. (Wikipedia.org, 2015).

Setelah era orde baru bergulir menjadi era reformasi, Golkar untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan seperti sebelumnya pada zaman Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar menurun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Gusdur dan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab masyarakat pada Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai

Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Dinamika panjang terus berjalan pada Partai berlambang pohon beringin tersebut, pada tahun 2004 Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum partai Golkar periode 2004-2009, dan Jusuf Kalla maju sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dan akhirnya terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden Pertama yang dipilih langsung oleh rakyat periode 2004-2009.

Ketika pada pemilihan Presiden 2009 Jusuf Kalla kembali maju menjadi calon Presiden dengan menggunakan perahu Partai Golkar dengan kapasitasnya sebagai Ketua Umum, berpasangan dengan Wiranto dari Partai Hanura, dan pada waktu itu Jusuf Kalla gagal menjadi Presiden dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden untuk kedua kalinya dan Boediono menjadi Wakil Presiden 2009-2014. Sehingga Munas 2009 di Riau akhirnya memilih kembali Ketua Umum Partai Golkar dengan terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar Periode 2009-2014, dinamika panjang terus menyelimuti Partai Golkar sampai pada pemilihan umum Legislatif dan pemilihan Presiden 2014.

Berawal pada pemilihan umum calon legislatif tahun 2014 dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2014, suhu perpolitikan di Indonesia kian memuncak apalagi peta politik yang di hadapkan bangsa Indonesia cukup mengundang gesekan-gesekan yang sangat rawan terjadi berbagai keberpihakan dan pengelompokan yang terjadi dalam pemilihan umum tersebut, terlebih suhu politik semakin tak terkendali ketika di helatnya pertarungan besar pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019, dua pasangan saling cari perhatian kepada masyarakat untuk bisa memilikinya pada saat pemilihan presiden, tidak hanya itu pertarungan semakin memuncak ketika hanya ada dua pasangan calon saja yang maju pada pemilihan presiden dan wakil presiden yakni Ir. Joko Widodo & Drs. Muhammad Jusuf Kalla dan lawannya Prabowo Subianto & Hatta Rajasa.

Kendati demikian banyaknya partai pengusung dalam koalisi yang terjadi, masing-masing partai merapatkan barisannya terhadap pilihan koalisinya, salah satunya partai dengan lambang pohon beringin yakni partai Golkar, di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, namun suhu politik semakin panas ketika Aburizal Bakrie menetapkan pilihan koalisinya kepada pasangan Prabowo-Hatta secara sepihak atas

nama partai politik, namun tidak sedikit pula kader partai Golkar kontra terhadap koalisi tersebut, terlebih Jusuf Kalla adalah salah satu kader partai Golkar dan pernah memimpin sebagai ketua umum partai Golkar. Teka-teki politik kian tak terbentung ketika Prabowo-Hatta kalah dalam pilpres dan dimenangi oleh pasang Jokowi-JK.

Peta Politik semakin terbaca, banyak sebagian kader Golkar yang tidak sepaham dengan keputusan awal Aburizal Bakrie hingga berakhir pada kekalahan pada koalisi merah putih Prabowo-Hatta dan membuat partai Golkar semakin terpuruk, yang selama ini partai Golkar selalu berada dalam lingkaran pemerintahan, hingga akhirnya pada tahun 2015 partai Golkar mengadakan Musyawarah Nasional di Bali pada tanggal 30 November sampai 3 Desember 2014, namun konflik kian tajam di waktu yang sama ternyata di Jakarta partai Golkar juga mempunyai kubu yang di bawah kepemimpinan Agung Laksono, yang secara perspektif tidak sepaham dan berbeda kepentingan Aburizal Bakrie, sehingga di waktu yang bersamaan terjadi dua kubu partai Golkar mengadakan Munas di ancil pada tanggal 6 Desember 2014, sehingga memicu kekacauan terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut, hingga masalah tersebut menjalar sampai ke

kepengurusan di daerah hingga terjadi banyak pengelompokan dan saling pihak memihak dalam mengklaim kepengurusan yang sah, baik itu kubu Aburizal Bakrie maupun kubu Agung Laksono.

Sebagai konsekuensi itu telah terjadi hambatan Golkar dipusat yang juga berdampak pada komunikasi dan konsolidasi Golkar di daerah akibat dari permasalahan ini juga membangun saling kubu di daerah, akibat dampak tersebut dikeluarkannya keputusan Partai Golkar di Kota Pontianak membuat permasalahan semakin bertambah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari DPD Provinsi Golkar Kalimantan Barat yang dilayangkan kepada DPD Partai Golkar Kota Pontianak terkait komposisi dan personalia kepengurusan Golkar Kota Pontianak yang baru, pasca konflik yang terjadi dipusat, dengan dikeluarkannya nama-nama lama yang secara organisasi mendukung pihak Aburizal Bakrie dan memasukkan nama-nama baru dalam struktur kepengurusan Golkar Kota Pontianak yang berpihak pada Aburizal Bakrie.

Sehingga dampak dari keputusan tersebut menimbulkan permasalahan baru di internal Partai Golkar Kota Pontianak khususnya hal ini tidak terlepas terjadinya dua kubu juga di DPD Partai Golkar Kota

Pontianak, sehingga apa dan mengapa Partai Golkar Kota Pontianak terjadi dua arah pemikiran, sehingga memicu apa peran Partai Golkar Pontianak terhadap komunikasi politiknya baik itu ke pusat maupun kepada para kadernya. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian terhadap partai ini di fokuskan di DPD Partai Golkar Kota Pontianak, dan ingin mengetahui sejauh mana dampak kekisruhan di pusat mengakar hingga kepengurusan di daerah, serta peran partai dan pimpinan partai di daerah dalam membangun komunikasi politik kepada para kader-kader partai.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Definisi Partai Politik

Partai politik modern seperti yang kita kenal merupakan fenomena baru dalam dalam sistem politik. Untuk mengetahui apa dan bagaimana partai politik beroperasi, ada baiknya kita melihat kembali literatur yang terkait dengan partai politik. Max Weber dapat dikategorikan sebagai pendiri pemikiran politik modern (Brechon, 1999). (dalam Firmanzah, 2011: 67). Bukunya yang berjudul *Economie et Societe* (1959). Menekankan aspek profesionalisme dalam

dunia politik modern. Partai politik kemudian didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (Politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik menurut Max Weber sangat berkembang pesat di abad ke-19 karena didukung oleh legitimasi legal-rasional. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik (Seilere, 1993). (dalam Firmanzah, 2011: 67).

### 2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik adalah:

- a. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga Negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik.
- b. Untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat.
- c. Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik.
- d. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi dan kepentingan yang

sama. (dalam A. rahman. H.I, 2007 : 103).

### 3. Kondisi Awal Penyebab Timbulnya

#### Konflik Organisasi

Tidak berbeda dengan penjelasan mengenai konflik, Handoko (1992) (dalam Wahyudi, 2006: 42).Menyimpulkan bahwa, konflik dalam organisasi timbul dikarenakan adanya masalah-masalah dalam komunikasi, hubungan pribadi, dan struktur organisasi.

Kegagalan komunikasi terjadi disebabkan salah pengertian berkenaan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, informasi yang mendua dan tidak lengkap, dan gaya(*style*)individu pimpinan yang tidak konsisten. Struktur organisasi adalah sistem formal hubungan-hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang dan kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan organisasi (Winardi, 1990:378-379) (dalam Wahyudi, 2006: 42).Masalah yang muncul dalam struktur organisasi berkenaan dengan persaingan pengaruh dan kekuasaan antar departemen/unit kerja, sistem penilaian yang tidak jelas, persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, dan perbedaan dalam menafsirkan organisasi.Persoalan hubungan pribadi adalah ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan

perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi.

### 4. Unsur- Unsur Komunikasi Politik

Komunikasi politik sebagai *body of knowledge* juga terdiri atas berbagai unsur, yaitu “sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek” (Nimmo, dkk). (dalam Hafied Cangara, 2009:37). Komunikasi politik dilakukan melalui proses yang meliputi unsur- unsur komunikasi politik, yaitu komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik dan pengaruh atau efek komunikasi politik.

### 5. Jenis Akibat Komunikasi Politik

#### a) Akibat Kognitif

Salah satu fungsi berita ialah menyajikan informasi yang dibutuhkan orang ketika dihadapkan pada situasi yang ambigius.

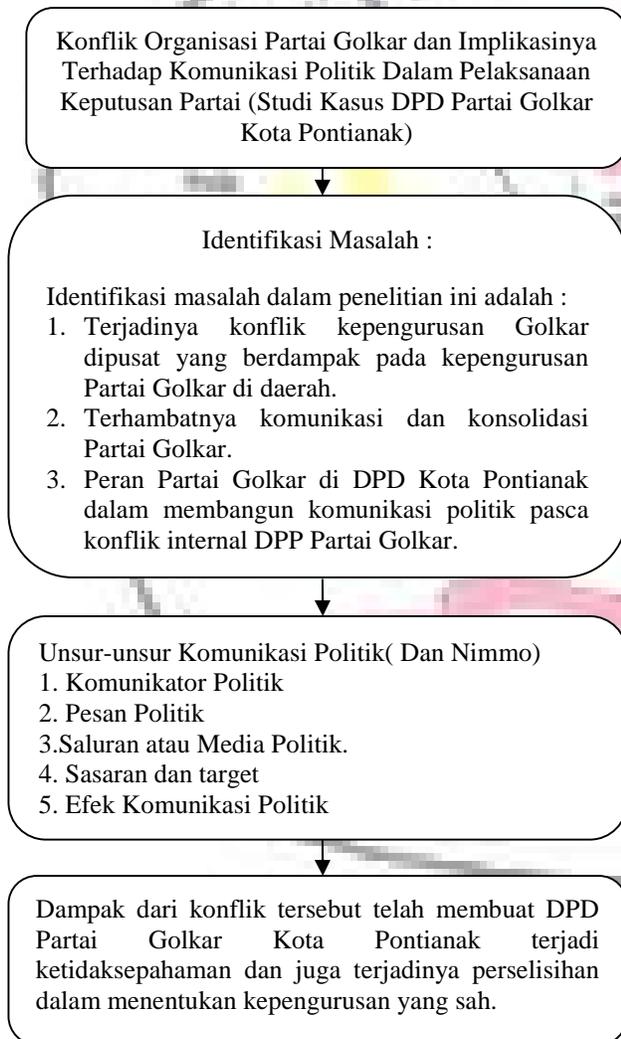
#### b) Akibat Afektif

Ada konsensus umum bahwa komunikasi politik lebih cenderung diperhitungkan orang dalam menyusun kepercayaan politik ketimbang dalam nilai politik mereka. Semakin jelas, misalnya bahwa media massa

mempengaruhi banyaknya informasi yang dimiliki orang tentang politik.

- c) Akibat Behavioral/Partisipasi
- Keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang agar secara aktif dapat terlibat dalam politik, di pihak lain, komunikasi politik bisa menekan partisipasi politik.

## 6. Kerangka Pikir



## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, tanda atau gambar tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Metode penelitian (dalam Usman Rianse dan Abdi, 2008: 1) berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan penelitian.

Penelitian ilmiah (dalam Bahdin dan Ardial, 2005: 11) adalah upaya untuk menjelaskan fenomena nyata yang kita alami dengan menetapkan prinsip umum untuk menerangkannya. Sesuai dengan harapan, ilmu dapat memprediksi fenomena tersebut.

Penelitian kualitatif menurut Satori dan Komariah (2009:22) adalah “penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang penting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Jangan sampai suatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.

Lokasi penelitian ini berada di DPD Partai Golkar Kota Pontianak, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan cara *purposive sampling* (ditentukan) informan yang dimaksud untuk dimintai keterangan dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak Pihak Aburizal Bakrie.
- b. Ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak Pihak Agung laksono.

- c. Kader Partai sekaligus Sekretaris Partai Golkar Kota Pontianak Pihak Aburizal Bakrie.
- d. Ketua pengurus Partai Golkar Pihak Aburizal Bakrie perwakilan dua kecamatan yaitu kecamatan Pontianak Timur, Pontianak Tenggara yang berada dalam wilayah Kota Pontianak.
- e. Salah satu kader Golkar Kota Pontianak dari Kubu Agung Laksono.

Untuk menghimpun data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti menurut Sugiyono (2007:64-82) sebagai berikut: 1). Observasi, 2). Wawancara, 3). Dokumentasi.

Dalam melakukan sebuah penelitian biasanya menggunakan alat atau instrumen untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Tujuannya supaya data yang dikumpulkan berupa yang valid dan akurat bukan data yang sembarangan. Menurut (dalam Sugiyono, 2007:72), bahwa: 1). Pedoman Wawancara, 2). Pedoman Observasi, 3). Pedoman dokumentasi.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data antara lain reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis komponensial. Dalam penelitian ini mengarah pada peran pimpinan partai dalam membangun komunikasi politik kepada para kader partai pasca dualisme kepengurusan di pusat, terutama apakah pengaruh pusat berdampak kepada pola komunikasi politik para kader sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan dua kubu di daerah sehingga konsentrasi fokus penelitian ini di fokuskan di DPD Partai Golkar di Kota Pontianak.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Sejarah Terbentuknya Partai Golkar**

Sebagai bentuk dari perlawanan terhadap tekanan-tekanan PKI dan dalam rangka pelaksanaan UUD 1945, maka golongan-golongan fungsional yang tidak berafiliasi pada Partai Politik dan dengan dukungan TNI berjuang keras untuk memformalkan kehadirannya di dalam masyarakat, maka atas dasar dorongan TNI

dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya atau disingkat Sekber Golkar pada tanggal 20 Oktober 1964. Tanggal inilah yang kemudian dijadikan hari lahirnya Golkar. Pada masa awal pertumbuhan Sekretariat bersama Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional, kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional karena golongan-golongan fungsional lainnya sudah menyadari bahwa Sekber Golkar berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta tujuan dan haluan adalah Demokrasi Pancasila untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekerjanya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

- a. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO).
- b. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
- c. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
- d. Organisasi Profesi.
- e. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM).
- f. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI).

g. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971.

## 2. Visi dan Misi Partai Golkar

### a. Visi Perjuangan

Sejalan dengan cita-cita para Bapak pendiri negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Partai Golkar sebagai pengemban cita-cita proklamasi itu dengan ini menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

### b. Misi

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai Golkar dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia: dan mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan

masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

## 3. Tujuan dan Fungsi Partai Golkar

### Kota Pontianak

1. Mempertahankan dan mengamalkan pancasila serta menegakkan UUD 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia.

## 4. Pembahasan

Pasca Pemilihan umum tahun 2014 telah banyak mengukir sejarah dan perjalanan bangsa indonesia, terhadap proses demokrasi yang berjalan di indonesia, tak terkecuali peranan Partai politik yang bertarung di arena pemilihan umum yang sangat kompetitif, salah satunya Partai

Golkar yang kali ini mengukir sejarah kembali terhadap kegaduhan yang terjadi di internal Partai yang berlambang beringin ini, dimana pasca pemilihan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014, Partai Golkar dilanda konflik yang bisa dikatakan prosesnya sangat rumit, sehingga berdampak pada para kader Golkar dan menimbulkan kegelisahan diantara para kader Golkar terutama munculnya dua kubu pengurus pusat yang sama-sama menyatakan bahwa mereka adalah kepengurusan yang sah, sehingga menimbulkan permasalahan dalam organisasi, komunikasi dan konsolidasi kepada para kader Golkar.

Adanya ketidakpuasan kader Golkar terhadap hasil Munas Bali 2014 yang memenangkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum telah menimbulkan babak baru permasalahan di partai berlambang pohon beringin tersebut, sehingga telah menimbulkan perlawanan secara dingin kepada pihak Aburizal Bakrie, dan pihak Agung Laksono yang terkesan dengan campur tangan secara politis oleh pihak pemerintah juga tidak bisa berbuat banyak terhadap proses yang ada, hal ini dibuktikan dengan lemahnya tata laksana organisasi Partai Golkar yang di komando oleh Agung laksono, lemahnya komunikasi, konsolidasi dan tidak memiliki sekretariat serta tidak

tertibnya administrasi yang dimiliki oleh pihak Agung Laksono yang menandakan manajemen organisasi yang dilakukan pihak Agung laksono di nilai sangat lemah dan hanya terkesan sebagai bentuk perlawanan kepada pihak Aburizal Bakrie, yang secara aturan sebelumnya pihak Aburizal Bakrie adalah pemegang sekretariat dan solidnya para kader yang dimiliki Aburizal Bakrie dan ini dibuktikan dengan agak tertibnya administrasi yang dimiliki oleh pengurus pihak Aburizal Bakrie, oleh karena permasalahan ini sehingga memunculkan persepsi yang berbeda-beda bagi seluruh kader Golkar baik itu siapa yang dianggap sebagai komunikator politik, pesan apa yang telah disampaikan, saluran atau media politik apa yang digunakan, sasaran dan target dan efek dari komunikasi politik yang sampai kepada kepengurusan Golkar didaerah, selanjutnya berbagai pernyataan yang telah diungkapkan oleh para kader Golkar dengan jawaban dan pendapat yang berbeda dalam pembahasan ini, terutama di DPD tingkat 2 Partai Golkar Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang telah peneliti kemukakan, maka ada beberapa hal yang dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu :

- a) Komunikator Politik, dimana proses ini para kader mendapatkan informasi terkait siapa komunikator politik dalam menyampaikan pesan. Dari proses inilah para kader Partai Golkar Kota Pontianak menyatakan bahwa komunikatornya adalah dari pihak Aburizal Bakrie sebagai komunikator yang sah dalam menyampaikan pesan tentang Partai Golkar, disisi lain sebagian kader yang mendukung Agung Laksono menyatakan komunikator yang sah dalam menyampaikan pesan adalah dari pihak Agung Laksono, sehingga sudah dipastikan bahwa di DPD Partai Golkar Kota Pontianak telah terjadi ketidaksepahaman dalam menentukan komunikator politiknya, sehingga konflik yang terjadi dipusat bukan hanya terjadi pada struktur kepengurusan pusat saja, tetapi konflik Partai Golkar yang terjadi dipusat justru berdampak pada pengurus Golkar didaerah terutama di DPD Partai Golkar Kota Pontianak.
- b) Pesan Politik, terkait pesan politik yang disampaikan oleh pihak Aburizal Bakrie yang menyatakan himbauan kepada seluruh kader Golkar agar menaati surat edaran yang telah disampaikan ke seluruh DPD, agar tetap berpedoman kepada AD / ART Partai Golkar, disisi lain pihak Agung Laksono menyatakan asumsi yang benar adalah berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Ham, yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono, sehingga pesan yang disampaikan oleh pengurus pusat menjadi dua arah dan membuat daerah semakin dibingungkan dalam menanti kepengurusan mana yang dinyatakan sah karena mereka sama-sama menyatakan kepengurusan mereka yang sah.
- c) Saluran atau Media Politik, tentang media yang digunakan dalam menerima pesan yang dianggap sah atau memenuhi syarat sebagai standar bahwa media tersebut dijadikan patokan dalam menentukan pesan yang sah, dari pihak Aburizal Bakrie menyatakan media yang menjadi patokan mereka adalah pesan melalui via e-mail yang dikirim kepada semua DPD di Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Idrus Marhan sebagai Sekretaris Jenderal, dan disisi lain pihak Agung Laksono menyatakan asumsi yang menjadi patokan adalah kekuatan hukum dari surat keputusan dari Menteri Hukum dan Ham (Menkumham).

- d) Target dan Sasaran, dalam menentukan kepengurusan yang dianggap sah oleh DPD Partai Golkar Kota Pontianak dari pihak Aburizal Bakrie mereka berpatokan pada intruksi dari DPP Pusat pihak Aburizal Bakrie yang menyebarkan surat edaran kepada seluruh DPD di Indonesia agar para kader Golkar tetap berpedoman pada aturan main organisasi, sedangkan dari pihak Agung Laksono tetap berasumsi kepada keputusan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) yang menyatakan bahwa kepengurusan yang sah adalah pihak Agung Laksono.
- e) Efek Komunikasi Politik, yang dikatakan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Pontianak oleh Bapak Herri Mustamin, SH yang menyatakan telah terjadi konflik Golkar dipusat yang berdampak pada kepengurusan Golkar didaerah, dan dampak ini tidak hanya dirasakan oleh Golkar DPD Kota Pontianak, melainkan hampir seluruh Golkar di wilayah Indonesia yang mengalami hal yang sama, perpecahan yang terjadi dipusat berdampak pada perpecahan didaerah dan berdampak, pada terjadinya ketidaksepahaman kepengurusan Golkar Kota Pontianak yang terjadi juga pihak-memihak, baik

itu pihak Aburizal Bakrie maupun pihak Agung Laksono yang berada di wilayah DPD Golkar Kota Pontianak, dampak secara keseluruhan ini juga membuat Golkar tidak dapat mengikuti kompetisi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.

## E. KESIMPULAN

Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa konflik yang terjadi di kepengurusan pusat Partai Golkar telah membangun Komunikasi Politik dua arah pada kepengurusan Golkar di daerah terutama pada kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Pontianak yang akibatnya terjadinya perselisihan dan ketidaksepahaman para kader dalam menentukan pilihan mereka, disisi lain bahwa bila ditinjau dari kedua pihak tersebut, baik itu pihak Aburizal Bakrie maupun pihak Agung Laksono, jika Aburizal Bakrie lemah dalam situasi politik sehingga terjadi bentuk perlawanan oleh pihak Agung Laksono, sedangkan pihak Agung Laksono lemah dalam tata laksana organisasi, komunikasi dan konsolidasi,

terkesan hanya sebagai bentuk perlawanan kepada pihak Aburizal Bakrie, hal ini dibuktikan dengan tidak tertibnya administrasi struktur yang dimiliki oleh pihak Agung Laksono, ketidakmampuan kader dalam membuktikan bukti tertulis baik itu struktur kepengurusan yang jelas serta surat keputusan oleh Menkumham, dan hanya sebatas asumsi serta minimnya bukti yang dimiliki, sehingga manajemen organisasinya dinilai sangat lemah dan terkesan hanya sebagai bentuk perlawanan serta terkesan oleh campur tangan pihak tertentu dalam hal ini pemerintah.

Dampak ini membuat para kader Golkar di kota Pontianak ada yang menyatakan bahwa pihak yang sah adalah pihak dari Aburizal Bakrie, dan ada juga sebagian kader Golkar DPD Kota Pontianak yang menyatakan yang sah adalah pihak Agung Laksono, artinya permasalahan Partai Golkar dipusat telah berdampak serius bagi para kader-kadernya di daerah, perpecahan dan permasalahan tersebut juga telah membuat Partai Golkar dirugikan secara keseluruhan yakni dengan tidak bisa ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, secara khusus akibat dari pengaruh konflik dipusat Partai Golkar telah membuat DPD Partai Golkar Kota

Pontianak terjadi ketidaksepahaman dan juga terjadinya perpecahan.

## F. SARAN

Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti menurut pembahasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepada semua para kader Partai Golkar agar tetap bijak dalam menyikapi dinamika yang terjadi dikepengurusan Partai Golkar dipusat, hal ini dikarenakan masalah yang terjadi adalah masalah internal Partai Golkar, dan diselesaikan secara kekeluargaan Partai Golkar, karena permasalahan ini terjadi dipusat, biarkan saja masalah ini diselesaikan disana, karena ada pihak-pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ini, oleh karenanya kepada seluruh kader Golkar dimanapun berada agar tetap menanti keputusan yang tetap yang akan diinformasikan kepada seluruh kader diseluruh wilayah Indonesia, dan untuk semua kader agar tetap tenang dan dingin dalam menghadapi dinamika yang terjadi pada partai yang berlambang pohon beringin tersebut.

2. Kepada semua kader Partai Golkar DPD kota Pontianak agar tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi dinamika yang terjadi dipusat, jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, tetaplah menjalankan organisasi Partai seperti biasanya dan jangan mudah terprovokasi terhadap intervensi-intervensi luar yang bisa memperkeruh suasana di Partai Golkar.
3. Kepada Pimpinan DPD Partai Golkar Kota Pontianak agar tetap menjadi pimpinan yang bisa merangkul semua kepentingan para kader Golkar, jangan sampai para kader Golkar terpecah-belah hanya karena kepentingan politis semata, tetapi bisa menjadi pimpinan yang bisa membimbing dan membina para kader agar tetap solid membangun Partai Golkar dan menjadi kader yang siap bekerja dan berkarya untuk masyarakat, serta mengabdikan dan berbakti untuk bangsa dan negara.
4. Harapan setelah ini adalah agar Partai Golkar kembali kepada marwah dan cita-cita Partai Golkar, agar semua kader bersatu, sehingga semua kader saling bekerjasama, bekerja dan berkarya membesarkan Partai Golkar, dan tidak ada pertikaian kembali, baik antar golongan maupun kelompok, dan

para kader sama-sama membangun dan membesarkan Golkar, sehingga harapannya adalah Partai Golkar memiliki kader yang punya militansi yang kuat, komitmen dalam membangun visi-misi dan ideologi Partai, serta siap menjadi kader yang berguna bagi kehidupan bangsa dan negara.

## G. REFERENSI

### 1. Buku-Buku:

Anggara, Sahya.2002. *Sistem Politik Indonesia*. CV Pustaka Setia: Bandung.

Arifin, Anwar.2014. *Politik Pencitraan Pencitraan Politik*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Budiardjo, Miriam.2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Bungin, Burhan.2007.*Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktulisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo: Jakarta.

Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik (Konsep, Teori dan Strategi)*. Rajawali Pers: Jakarta.

Engkus Kuswarno dkk.2011.*Komunikasi Kontekstual Teori dan Komunikasi Kontemporer*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung.

Firmanzah.2011. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik*

di Era Demokrasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.

H.I, A. Rahman.2007.*Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Masyhuri, Zainuddin M.*Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Refika Aditama: Bandung.

Masyhuri, Zainuddin M.*Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Refika Aditama: Bandung.

Nimmo, Dan.2005. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan dan Media)*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.

Rakhmat, Jalaluddin.2001. *Komunikasi Politik Khalayak dan efek*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung.

Rais, M. Amien. 1993. *Golkar dan Demokratisasi di Indonesia. Pusat Pengkajian dan Kebijakan (PPSK)*: Yogyakarta.

Rianse, Usman dan Abdi.2008.*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Teori dan Aplikasi*, Alfabeta: Bandung.

Robbins, Stephen P.2006. *Perilaku Organisasi*. PT Indeks Kelompok Gramedia: Klaten.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan.2009.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.

Soyomukti, Nurani.2013.*Komunikasi Politik*. Intrans Publishing: Malang.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

..... 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan.2009.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.

Tanjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Tandjung, Akbar. 2003. *Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasional*. Golkar Press: Jakarta.

Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Wahjono, Sentot Imam. Sentot.2009. *Perilaku Organisasi*. Graha Ilmu: Surabaya.

Wahyudi. 2006. *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*. Alfabeta: Bandung.

## 2. Media

( HarianKompas Edisi Rabu, 4 November 2015 )

## 3. Sumber Internet

Misliyah.2010. **Komunikasi Politik Melalui Media Massa Pasangan Mochtar Mohammad- Rahmat Effendi dalam Pilkada Walikota Bekasi Periode 2008-2013**.Di akses Pada tanggal 26-11-2015 Kamis Pukul 17:20 Wib [Http://repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)

Sari, Ervi Yumika.2013.**Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tanjungpinang Tahun 2009**.Di akses Pada tanggal 26-11-2015 Kamis Pukul 17:30 Wib [Http://jurnal.umrah.ac.id](http://jurnal.umrah.ac.id)

Sepkawegi,ViddyRicard.2013.**Komunikasi Politik DPC Partai Demokrat Kota Tanjungpinang Tahun 2009**. Di akses Pada

tanggal 26-11-2015 Kamis Pukul 17:25 Wib  
<Http://jurnal.umrah.ac.id>

(Wikipedia.org,2015)[https://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Golongan\\_Karya](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya) Di akses  
Pada tanggal 30-11-2015 Senin Pukul 11:22  
Wib.

(Kompas.com,2015)

<Http://nasional.kompas.com/read/2014/11/26/15462301>Di akses Pada tanggal 09-12-  
2015 Rabu Pukul 16:00 Wib

#### 4. Dokumen :

AD/ART Partai Golkar





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
 Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MUBARAT DEONESIUS  
 NIM / Periode lulus : E02112067 / IV  
 Tanggal Lulus : 6 Juni 2016  
 Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Administrasi  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 E-mail address/ HP : Mubarat.deonesius@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada Program Studi ..... ILMU POLITIK ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Konflik Organisasi Partai Golkar dan Implikasinya Terhadap Komunikasi Politik Dalam Pelaksanaan Keputusan Partai (Studi kasus DPD Partai Golkar Kota Pontianak)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltext
- content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
 Pengelola Jurnal.....  
  
 Ori Fatmahanikah, S.I.P., M.Si  
 NIP. 196911272002121002

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 27 Juli 2016  
 MUBARAT DEONESIUS  
 NIM. E02112067

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)